

Keragaman dewan komisaris dan penghindaran pajak bukti dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022

Cindy Muljadi*, Yie Ke Feliana

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Surabaya

*Corresponding author: cindymuljadi08@gmail.com

Abstrak

Keragaman dalam susunan dewan komisaris adalah faktor penting yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Keragaman tersebut mencakup ragam jenis kelamin, keahlian keuangan, variasi usia, dan keragaman kewarganegaraan. Keragaman di dewan komisaris dianggap sebagai salah satu sifat yang dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek keragaman dalam dewan komisaris serta dampaknya terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan di *Indonesian Stock Exchange* (IDX) pada periode 2020-2022. Sampel mencakup 765 tahun keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama periode 2020-2022, dan hipotesis penelitian dianalisis melalui penerapan model regresi linear berganda. Temuan menunjukkan bahwa keragaman dalam komposisi dewan komisaris memiliki dampak mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, tingkat pengalaman keuangan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris juga berkontribusi pada pengurangan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian mengenai keragaman dewan komisaris kurang umum dilakukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, temuan dari studi ini tidak hanya menambahkan dimensi baru pada literatur teoretis mengenai penghindaran pajak di negara-negara berkembang, termasuk pasar modal Indonesia yang sedang berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memberikan panduan kepada investor, regulator pasar modal, dan pembuat standar untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Kata kunci: *Gender Diversity, Financial Expertise, Age Diversity, Nationality Diversity, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebuah anggaran untuk penerimaan dan pengeluaran uang oleh negara dalam tahun mendatang. Rencana ini berkaitan dengan rencana proyek yang akan dilakukan dalam tempo waktu yang lama. Salah satu sumber penerimaannya berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan Mala (2021), APBN Indonesia mendapat kontribusi terbesar dari pajak di negara ini. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak di Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2020, Indonesia mencatatkan kegagalan dalam penerimaan pajak atau dapat dikatakan mengalami "shortfall". Namun pada tahun 2021 dan 2022 tren ketidakberhasilan ini berhenti. Keberhasilan penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 yang menyebabkan tren positif ini rupanya masih belum dapat membuat lega, hal ini dikarenakan tren positif yang diraih pada 2 tahun terakhir ini akibat adanya beberapa unsur seperti adanya program amnesti pajak jilid 2 atau yang lebih dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan adanya kenaikan pada harga komoditas yang terjadi pada tahun tersebut.

Keberhasilan ini ternyata berbanding terbalik dengan tingkat *tax ratio* atau penerimaan pajak bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat bahwa *Tax Ratio* tahun 2021 hanya 9,11% bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berhasil mencapai 10,24% (Dihni, 2022). Tidak mencapainya penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya dan juga rendahnya rasio pajak di Indonesia bila disandingkan dengan rekan negara lainnya di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak kurang maksimal (Shilvina, 2022). Ada indikasi bahwa sebagian wajib pajak selalu berusaha mencari cara untuk mengurangi besaran pembayaran pajak yang harus mereka lakukan. Penghindaran pajak merupakan suatu

bentuk tindakan yang tidak etis, selain merupakan tindakan yang tidak etis, penghindaran pajak yang dapat menyebabkan *tax ratio* selalu rendah ini, perlu pengawasan yang ketat terutama ketika Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan “Indonesia Emas 2045”. Hal ini dapat dijelaskan melalui salah satu dari 17 arah pembangunan yaitu “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” terkait stabilitas ekonomi makro, yang menjelaskan untuk dapat mencapai hal tersebut nantinya di tahun 2045 Indonesia membutuhkan nilai *tax ratio* di kisaran angka 12,88% (BAPPENAS, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya juga memberikan dukungan terhadap temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini Tanujaya & Anggreany (2021) yang menjelaskan bahwa sistem tata kelola perusahaan merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak ((Bayar, *et al.*, 2018); (Govindan *et al.*, 2021) (Jarboui *et al.*, 2020)). Bagian paling relevan dari sistem ini adalah adanya dewan komisaris yang dinamis dan koheren (Saleem *et al.*, 2021). Dewan komisaris juga memiliki peranan yang penting dalam mengurangi masalah keagenan keagenan ((Fama & Jensen, 1983); (Jensen & Meckling, 1976); (Aslam & Haron, 2021); (Barros & Sarmiento, 2020)). Dewan komisaris pun memikul tanggung jawab atas urusan perpajakan pada perusahaan (Nadeem *et al.*, 2017). Perusahaan yang dewan direksinya tidak heterogen dan inklusif maka dapat dikatakan perusahaan tersebut kurang memiliki kredibilitas dengan seluruh manajemen serta karyawannya. Terdapat beberapa alasan terkait pentingnya keragaman pada dewan perusahaan seperti mencegah terjadinya kegagalan dalam sistem tata kelola perusahaan (Magnanelli & Pirolo, 2021).

Tujuan dari studi ini juga adalah memberikan bukti tambahan yang dapat memperkuat atau menentang hasil temuan penelitian sebelumnya di negara-negara maju atau di negara berkembang lainnya. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan generalisasi temuan ini dalam konteks pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih sampel 765 tahun perusahaan dari perusahaan yang teregister di IDX. Peneliti menemukan bahwa keragaman dewan komisaris yang diukur menggunakan keragaman jenis kelamin, keahlian keuangan, keragaman usia dan keragaman kewarganegaraan mengurangi penghindaran pajak. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa latar belakang pengalaman keuangan yang dimiliki oleh dewan komisaris menghasilkan pengurangan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan. Makalah ini berkontribusi pada literatur akuntansi yang ada yang ditulis mengenai topik tersebut dengan cara berikut.

Pertama, hasil penelitian dapat menambah teori tentang penghindaran pajak di pasar modal negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, bukti menunjukkan bahwa keragaman dewan komisaris dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi manajer, investor, regulator pasar modal, dan otoritas pajak. Sebagai penutup, temuan ini dapat memunculkan ide-ide baru untuk studi lebih lanjut dalam domain penghindaran pajak perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Agency theory

Agency problem ini timbul akibat terdapatnya perbandingan tujuan dari dini antara pemegang saham dengan manajemennya, sepatutnya antara 2 pihak tersebut mempunyai arah yang sama. Terdapat perceraian kepemilikan serta kontrol yang menimbulkan permasalahan agensi yang populer (Solomon, 2020). Atau dengan kata lain adanya masalah keagenan yang terjadi pada pihak manajemen dengan para shareholdersnya (Jensen & Meckling, 1976). Adanya *disfuntional behavior* yang dilakukan oleh para manajemen, dikarenakan mereka menyadari bahwa mereka memiliki informasi yang lebih banyak dan unggul yang dibutuhkan oleh para prinsipal. Informasi yang lebih banyak ini akhirnya membuat manajemen ingin menguasai sendiri informasi tersebut dan informasi tersebut tidak akan diungkapkan ke pihak shareholders, atas hal inilah terjadinya asimetri informasi (Watts & Zimmerman, 1986).

Tax avoidance

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk perlawanan, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses pemungutan pajak yang seharusnya berlangsung tanpa kendala. Akibat dari tindakan ini adalah terjadinya penyusutan pada penerimaan pajak setiap tahunnya (Fadhilah, 2014). Usaha buat memperkecil pembayaran pajak yang dicoba secara sah dengan

menggunakan syarat di bidang perpajakan seperti adanya kelemahan yang belum ada aturan pajak yang berlaku disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal selama tindakan yang dilakukan tidak berlawanan terhadap aturan yang ada (Hantoyo *et al.*, 2016).

Keragaman jenis kelamin

Di antara atribut-atribut personal, keragaman jenis kelamin tentunya menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Penekanan ini disebabkan fakta bahwa saat ini, di seluruh dunia, perempuan tidak terlalu terlibat dalam dewan perusahaan. Nasution & Jonnergard (2017) menjelaskan terkait dengan teori sosialisasi jenis kelamin yang menyatakan perbedaan karakteristik antara pria dan wanita dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Srinidhi *et al.* (2011) menjelaskan bahwa adanya keragaman merupakan bagian penting dari sebuah tata kelola perusahaan. Keragaman jenis kelamin paling mendekati sebagai faktor peningkat nilai dan juga menjadi faktor yang mempengaruhi karakter dari individu. Selain itu adanya keragaman jenis kelamin dalam dewan komisaris diharapkan bisa menjadi Suatu penghubung antara kepentingan manajemen dan pemegang saham dalam operasional perusahaan.

Keragaman keahlian keuangan

Teori *upper echelon* menjelaskan bahwa karakter dari seorang dewan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada sebuah kebijakan yang diambil. Sebuah keahlian di bidang keuangan atau *financial expertise* membuat seorang dewan bisa bertindak lebih agresif. Keahlian keuangan dapat dijelaskan dengan pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan, mencakup latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan dan lain-lain (Magnanelli & Pirolo, 2021). Sedangkan menurut Huang & Zhang (2019) menjelaskan bahwa pengalaman pekerjaan di bidang keuangan dapat dilihat atau diketahui ketika seorang dewan memiliki pengalaman di bidang keuangan seperti pernah bekerja sebagai akuntan, pernah menjabat menjadi *chief finance officer* (CFO), direktur keuangan dan lain-lain.

Keragaman usia

Prestasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh usia anggota dewan komisaris. Kagzi (2018) mengindikasikan bahwa usia di dewan komisaris memiliki dampak yang signifikan pada kinerja perusahaan. Semakin matang atau senior usia dari seorang dewan komisaris menandakan semakin matangnya pengawasan yang dapat dilakukan, terutama dalam kesesuaiannya terhadap peraturan pemerintah. Selain itu usia yang lebih senior pada dewan komisaris bisa juga menandakan pengalaman yang lebih banyak dan dapat membantu perusahaan apabila kondisi perusahaan sedang terancam (Kahar, 2016).

Keragaman kewarganegaraan

Masalah yang lebih baru dalam atribut pribadi yang mempengaruhi keragaman diwakili oleh kewarganegaraan. Keragaman kewarganegaraan terdiri dari memiliki perwakilan yang berasal dari berbagai negara. Aspek keragaman tampaknya menjadi relevan terutama untuk perusahaan internasional karena latar belakang kewarganegaraan yang berbeda lebih baik mewakili setiap wilayah pasar di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan di seluruh dunia tampaknya masih enggan mempekerjakan anggota dewan dengan kewarganegaraan yang berbeda, studi empiris menunjukkan bahwa keragaman kewarganegaraan berkorelasi positif secara signifikan dengan kinerja perusahaan karena pengetahuan, kreativitas, dan inovasi yang lebih tinggi yang berdampak positif pada hasil keuangan (Jhunjhunwala & Mishra, 2012). Heterogenitas cara berpikir, gagasan, dan cara bertindak manajemen akan meningkatkan kinerja manajemen (Hambrick *et al.*, 1996). Dengan demikian, keragaman kewarganegaraan di antara anggota dewan dapat membawa banyak pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai pasar dan berbagai jenis pelanggan yang semakin relevan dengan lingkungan global saat ini.

Research hypotheses

Kedatangan wanita di dewan perusahaan jadi sangat berarti sebab kedudukan efisien mereka dalam memantau kinerja manajerial. Direktur perempuan melaksanakan yang terbaik buat menyeimbangkan

sikap tanggung jawab industri terhadap publik serta pemegang saham. Adams & Ferreira (2009) berkomentar kalau kedatangan wanita di dewan industri sudah sukses menahan sikap oportunistik manajerial serta menghindari kebajikan palsu mereka dengan iktikad menghindari pajak buat mengoptimalkan kepentingan pemegang saham. Richardson & Lanis (2016) memilih 300 perusahaan Australia selama tahun 2006–2010 untuk mengkaji dampak kehadiran wanita di dewan perusahaan dalam mengecilkan penghindaran pajak. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa kehadiran perempuan di dewan perusahaan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penghindaran pajak. Maka dari itu hipotesis 1 yakni:

H1: Kehadiran wanita dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Penelitian Armstrong & A (2015) menjelaskan bahwa dewan komisaris yang mempunyai status *financial expertise* memiliki kecenderungan agresif dalam melakukan pengawasan dan dapat meminimalkan masalah keagenan yang terjadi ketika penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan berada di level yang ekstrem. Keahlian keuangan seperti latar belakang edukasi keuangan dan pengalaman pekerjaan di bidang keuangan yang dimiliki dapat membuat dewan komisaris dalam melakukan tugas pengawasan menjadi lebih efektif, mereka juga dapat menemukan masalah-masalah yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan (Wulandari & Rachmawati, 2021). Maka dari itu hipotesis 2 yakni:

H2: Keahlian keuangan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Dewan komisaris yang memiliki usia yang lebih senior cenderung lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga mereka mengawasi perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi tanpa melakukan kegiatan yang tidak etis seperti tindakan penghindaran pajak (Kagzi, 2018). Oleh karena itu semakin dewasa umur seseorang maka ia juga akan semakin ketat dalam melakukan pengawasan agar perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti praktik penghindaran pajak. Selain itu, dewan komisaris dengan usia yang lebih senior cenderung melakukan tindakan yang menghindari risiko (*risk advers*) contohnya melakukan tindakan penghindaran pajak yang berisiko. Maka dari itu hipotesis 3 yakni:

H3: Kehadiran dewan komisaris yang memiliki umur lebih senior berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Kebangsaan adalah representasi dari etnis karena sebenarnya individu dapat memiliki kewarganegaraan meskipun mereka atau keluarganya berasal dari negara yang berbeda. Adanya keragaman kewarganegaraan di antara anggota dewan komisaris dapat membawa banyak pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai pasar dan berbagai jenis pelanggan yang semakin relevan dengan lingkungan global saat ini (Magnanelli & Pirolo, 2021). Kehadiran dewan komisaris yang berkebangsaan asing membawa cara pandang dan perspektif variasi antara satu negara dengan negara lainnya Kehadiran dewan komisaris asing juga memberikan pengalaman serta pengetahuan baru mengenai skema-skema untuk dapat mengurangi beban perusahaan salah satunya terkait dengan beban pajak yang dibayar perusahaan, sehingga menjadi indikasi adanya penghindaran pajak. Maka dari itu hipotesis 4 yakni:

H4: Dewan komisaris berkebangsaan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

METODOLOGI

Sample selection

Peneliti memilih semua perusahaan publik di IDX selama periode 2020-2022 sebagai sampel awal. Dari sampel awal ini, Perusahaan yang tidak secara berkesinambungan menerbitkan laporan keuangan akan dihapus. Demikian juga, perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah dan tidak mengakhiri periode laporan keuangan pada 31 Desember juga akan dihilangkan. Perusahaan yang mengalami kondisi rugi selama tahun 2020-2022, perusahaan yang *delisted* dan perusahaan yang tidak menyajikan variabel penelitian yang lengkap akan dieliminasi. Hal ini memberikan sampel akhir yaitu 765 tahun perusahaan dari periode 2020-2022. Tabel 1 membahas rincian prosedur.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel sebagai Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah Observasi	
	Model 1: ETR	Model 2: BTD
Total tahun perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022	2595	2595
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut 2020-2022	(561)	(561)
Perusahaan yang laporan keuangannya disajikan dalam mata uang selain rupiah dan periode pelaporan tidak berakhir pada 31 Desember	(273)	(273)
Perusahaan yang mengalami kondisi rugi bersih selama periode 2020-2022	(831)	(831)
Perusahaan yang <i>delisted</i> dari BEI periode 2020-2022	(6)	(6)
Perusahaan yang tidak menyajikan data lengkap terkait dengan variabel dependen, independen, dan kontrol	(159)	(159)
Total Perusahaan yang tersedia sebagai sampel	765	765
Sampel yang dihapuskan karena <i>outlier</i>	(42)	(38)
Total sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini	723	727

Sumber: www.idx.co.id, *website* perusahaan

Variables measurement

Permodelan regresi yang akan digunakan dalam penelitian:

$$[(TA)]_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Female} + \alpha_2 [(Finexp + \alpha_3 \text{Age})_{it} + \alpha_4 \text{Nationality} + \alpha_5 \text{Size} + [\alpha_6 [(Leverage)]_{it} + \alpha_7 [(ROE)]_{it} + \alpha_8 [(Growth)]_{it} + \epsilon_{it}]$$

Dependent variables

Variabel dependen pada riset ini yaitu *tax avoidance* (TA), yang sesuai dengan penelitian Hoseini et al., (2018), diproksikan dengan dua ukuran. Ukuran pertama adalah pertama adalah *effective tax rate* yang dihitung sebagai berikut:

$$ETR = (\text{Beban Pajak Penghasilan}) / (\text{Laba sebelum pajak})$$

Pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan ETR mengindikasikan bahwa apabila nilai ETR meningkat, tingkat penghindaran pajak akan menurun, sebaliknya, apabila nilai ETR menurun, tingkat penghindaran pajak akan meningkat (Richardson & Lanis, 2007). Oleh karena adanya perbedaan pembacaan pada hasil ETR dengan penghindaran pajak, peneliti akan mengalikan nilai ETR yang didapatkan dengan (-1) agar hasil yang didapatkan nantinya sudah sejalan dengan definisi dari penghindaran pajak.

Selanjutnya untuk pengukuran yang kedua yaitu *book tax differences* (BTD) yang dihitung:

$$BTD = (\text{Penghasilan sebelum pajak} - \text{Penghasilan kena pajak}) / (\text{Penghasilan sebelum pajak})$$

Independent variables

1. Keragaman Jenis Kelamin:
 $Female = (\text{Jumlah Dewan Komisaris Wanita}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$
2. Keahlian Keuangan:
 $Financial\ Expertise = Education\ Background + Experience\ Background$
 - Perhitungan *Education Background* yaitu menggunakan perhitungan:
 $Education\ Background = (\text{Jumlah Dewan Komisaris Berlatar Pendidikan Keuangan}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$
 - Perhitungan *Experience Background* yaitu menggunakan perhitungan:
 $Experience\ Background = (\text{Jumlah Dewan Komisaris Berlatar Pengalaman Keuangan}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$
3. Keragaman Usia:
 $AGE = (\text{Jumlah Umur Dewan Komisaris}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$

4. Keragaman Kewarganegaraan:

$$\text{Nationality} = (\text{Jumlah Dewan Komisaris Berkewarganegaraan Asing}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$$
Control variable

Pada penelitian ini terdapat empat variabel kontrol. *Size* adalah ln dari total penjualan. *Leverage* adalah total utang dibagi dengan total aset. ROE adalah *net profit after tax* dibagi dengan *stockholders equity*. Terakhir *sales growth* yaitu perubahan penjualan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Descriptive statistics**

Gambar 1 dan gambar 2 menjelaskan statistik deskriptif dari variabel sampel dari tahun 2020 hingga 2022. Seperti yang dapat dilihat *effective tax rate* adalah 21,49%, selain itu sekitar 43 persen aset perusahaan dibiayai dengan utang.

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	723	-0,5011	-0,000073	-0,2149	0,0904
Female	723	0,0000	1,0000	0,1530	0,2164
FinExp	723	0,0000	2,0000	0,5253	0,5028
Age	723	30,5000	86,5000	59,1270	8,1726
Nationality	723	0,0000	0,7500	0,08252	0,1726
Size	723	21,8020	33,3393	28,25063	1,9869
Lev	723	0,0024	0,9717	0,4310	0,2261
ROE	723	0,0014	1,4508	0,1206	0,1293
Growth	723	-25,6964	0,9812	0,0013	1,1649

Gambar 1. Hasil Statistik Deskriptif untuk Model 1 ETR

Sumber: Data diolah

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	727	-1,3500	1,5960	0,2866	0,5149
Female	727	0,0000	1,0000	0,1576	0,2184
FinExp	727	0,0000	2,0000	0,5376	0,5017
Age	727	31,5000	86,5000	59,3698	7,8899
Nationality	727	0,0000	0,8000	0,0946	0,1847
Size	727	22,0834	33,3394	28,2969	1,9463
Lev	727	0,00410	0,9717	0,4357	0,2258
ROE	727	0,0002	1,450	0,1190	0,1296
Growth	727	-3,3625	0,9812	0,0617	0,3192

Gambar 2. Hasil Statistik Deskriptif untuk Model 2 BTD

Sumber: Data diolah

Correlation between variables

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel ETR memiliki korelasi negatif signifikan di level 0,01 terhadap variabel *Female*, *FinExp*, *AGE*, dan *Nationality*. Hal tersebut berarti perusahaan yang mempunyai dewan komisaris berjenis kelamin wabuta, memiliki dewan komisaris yang memiliki *educational background*

dan *experience background* keuangan, memiliki dewan komisaris yang berusia lebih senior dan memiliki dewan komisaris yang berkewarganegaraan asing, maka nilai ETR perusahaan tersebut akan semakin kecil dan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan semakin kecil. Variabel *female* berkorelasi negatif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel AGE, *nationality*, *size*. Sedangkan *female* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel *finexp*. Variabel *finexp* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *leverage*. Variabel AGE berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *size* dan *leverage*, dan berkorelasi signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel *growth*. Variabel *nationality* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% pada variabel *size* dan positif dan signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel ROE. Variabel *size* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% pada variabel *leverage*, ROE, dan *growth*. Variabel *leverage* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel ROE. Variabel ROE tidak signifikan terhadap variabel *growth* yang menjelaskan bahwa variabel ROE tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan *growth* perusahaan.

Table 2. Hasil Uji Korelasi (r) Model 1: ETR

	ETR	Female	FinExp	AGE	Nationality	SIZE	LEV	ROE	GROWTH
ETR	1	-0,099**	-0,236**	-0,201**	-0,189**	-0,037	-0,294**	-0,012	-0,032
Female	-0,099**	1	0,086*	-0,163**	-0,116**	-0,196**	0,036	0,051	0,044
FinExp	-0,236**	0,086*	1	0,049	0,021	-0,007	0,280**	-0,053	0,032
AGE	-0,201**	-0,163**	0,049	1	0,020	0,214**	0,197**	-0,047	0,090*
Nationality	-0,189**	-0,116**	0,021	0,020	1	0,135**	0,072	0,084*	-0,018
SIZE	-0,037	-0,196**	-0,007	0,214**	0,135**	1	0,288**	0,218**	0,158**
LEV	-0,294**	0,036	0,280**	0,197**	0,072	0,288**	1	0,082*	0,040
ROE	-0,012	0,051	-0,053	-0,047	0,084*	0,218**	0,082*	1	0,069
GROWTH	-0,032	0,044	0,032	0,090*	-0,018	0,158**	0,040	0,069	1

Sumber: Data diolah

Catatan: ** Korelasi signifikan pada level 0,01

* Korelasi signifikan pada level 0,05

Table 3. Hasil Uji Korelasi (r) Model 2: BTD

	BTD	Female	FinExp	AGE	Nationality	SIZE	LEV	ROE	GROWTH
BTD	1	-0,191**	-0,173**	-0,051	-0,105**	0,145**	-0,172**	-0,031	-0,049
Female	-0,191**	1	0,099**	-0,164**	-0,056	-0,199**	0,044	0,034	0,019
FinExp	-0,173**	0,099**	1	0,017	0,061	-0,035	0,257**	-0,074*	-0,048
AGE	-0,051	-0,164**	0,017	1	0,025	0,180**	0,162**	-0,066	-0,089*
Nationality	-0,105**	-0,056	0,061	0,025	1	0,123**	0,087*	0,032	-0,077*
SIZE	0,145**	-0,199**	-0,035	0,180**	0,123**	1	0,283**	0,212**	0,033
LEV	-0,172**	0,044	0,257**	0,162**	0,087*	0,283**	1	0,069	-0,047
ROE	-0,031	0,034	-0,074*	0,066	0,032	0,212**	0,069	1	0,148**
GROWTH	-0,049	0,019	-0,048	-0,089*	-0,077*	0,033	-0,047	0,148**	1

Sumber: Data diolah

Catatan: ** Korelasi signifikan pada level 0,01

* Korelasi signifikan pada level 0,05

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel BTD memiliki korelasi negatif signifikan di level 0,01 terhadap variabel *Female*, *FinExp*, dan *Nationality*. Hal tersebut berarti perusahaan yang memiliki dewan komisaris berjenis kelamin perempuan, memiliki dewan komisaris yang memiliki *educational background* dan *experience background* keuangan, dan memiliki dewan komisaris yang berkewarganegaraan asing, maka nilai BTD perusahaan tersebut akan semakin kecil dan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan semakin kecil. Variabel *female* berkorelasi negatif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel AGE dan *size*. Variabel *finexp* berkorelasi negatif dan signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel ROE. Selanjutnya variabel *finexp* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *leverage*. Variabel AGE berkorelasi negatif signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel *growth*. Selanjutnya variabel AGE berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *size* dan *leverage*. Variabel *nationality* berkorelasi negatif dan signifikan pada tingkat 5% pada variabel *growth*.

Selanjutnya variabel *nationality* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *size* dan berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel *leverage*. Variabel *size* berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *leverage* dan berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 5% terhadap variabel ROE. Variabel *leverage* tidak signifikan terhadap variabel variabel ROE dan *growth*. Variabel ROE berkorelasi positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap variabel *growth*.

Regression results

Untuk menguji validitas atau keabsahan data, digunakan empat uji asumsi klasik. Tujuan dari uji ini, sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati (2013), adalah untuk pengecekan prasyarat dilakukan sebelum melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah terkumpul, agar didapatkan keyakinan bahwa data yang tersaji ini tidak terdapat bias teoritis, serta agar konsisten dan efisien untuk menjelaskan suatu regresi. Berdasarkan uji asumsi klasik, uji multikolinieritas didapatkan bahwa data penelitian terbebas dari gejala multikolinieritas. Berikutnya, uji normalitas didapatkan bahwa data penelitian tidak terdistribusi normal, namun mengingat data yang digunakan memiliki jumlah sampel yang besar maka data diasumsikan telah berdistribusi normal sesuai dengan prinsip *Central Limit Theorem* (CLT) (Gujarati, 2013). Selanjutnya uji heteroskedastisitas, dari hasil pengujian didapatkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data penelitian tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi terakhir menunjukkan bahwa data penelitian tidak mengandung masalah autokorelasi

Hasil uji simultan yang didapatkan memiliki nilai signifikan di bawah 5% yang menjelaskan bahwa keseluruhan variabel penelitian dapat menjelaskan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil uji parsial didapatkan bahwa keseluruhan variabel independen memiliki nilai signifikan di bawah 5% dan memiliki korelasi negatif. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama, kedua, dan ketiga diterima sedangkan hipotesis keempat ditolak.

Variabel Independen	B	t-test Sig.	F-test Sig.	Adjusted R ²
(Constant)	-0,118	0,018	0,000	0,171
Female	-0,048	0,001		
FinExp	-0,027	0,000		
AGE	-0,002	0,000		
Nationality	-0,099	0,000		
SIZE	0,003	0,072		
LEV	-0,087	0,000		
ROE	-0,002	0,925		
Growth	-0,001	0,752		

Gambar 3. Hasil Pengujian Regresi Linier Model 1: ETR
Sumber: Data diolah

Variabel Independen	B	t-test Sig.	F-test Sig.	Adjusted R ²
(Constant)	-0,548	0,067	0,000	0,119
Female	-0,356	0,000		
FinExp	-0,108	0,004		
AGE	-0,006	0,013		
Nationality	-0,332	0,001		
SIZE	0,054	0,000		
LEV	-0,390	0,000		
ROE	-0,224	0,121		
Growth	-0,120	0,036		

Gambar 4. Hasil Pengujian Regresi Linier Model 2: BTD
Sumber: Data diolah

PEMBAHASAN

Penerimaan pajak selalu berada di bawah target dari tahun 2009 hingga tahun 2020 penerimaan pajaknya, barulah pada tahun 2021-2022 Indonesia berhasil mencapai target penerimaan pajaknya, atau bisa disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya (Kurniati, 2023). Meskipun berhasil mencapai targetnya, apabila membandingkan penerimaan pajak dengan *tax ratio*, nilai *tax ratio* Indonesia tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dan *tax ratio* Indonesia juga merupakan *tax ratio* Indonesia paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (World Bank Data, 2023).

Dengan adanya keberhasilan pencapaian target namun kegagalan dalam pencapaian *tax ratio* hal ini disinyalir masih adanya kegiatan upaya penghindaran pajak, terutama yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Sulistiyanti & Nugraha, 2021). Perusahaan dapat mencegah dirinya agar tidak melakukan upaya yang tidak etis ini dapat diawasi oleh dewan komisaris (Tanujaya & Anggreany, 2021). Perusahaan yang dewan komisarisnya tidak heterogen dan inklusif maka dapat dikatakan perusahaan tersebut kurang memiliki kredibilitas. Salah satu keragaman pada dewan komisaris yaitu adanya keragaman pada jenis kelamin melalui kehadiran perempuan dalam susunan dewan komisaris di perusahaan (Magnanelli & Pirolo, 2021).

Hasil hipotesis pertama mengungkapkan, Kehadiran dewan komisaris keterwakilan perempuan dalam dewan komisaris perusahaan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, karena kehadiran mereka memberikan peran penting dan efektif dalam fungsi pengawasan. Kehadiran anggota dewan komisaris perempuan dapat menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan masyarakat secara umum. Berbeda dengan laki-laki, perempuan dinilai kurang menunjukkan sikap toleransi terhadap perilaku oportunistik dalam pengambilan keputusan (Riguen *et al.* 2021). Selain itu terdapat juga cara berbeda untuk dapat mendeteksi perbedaan antara pria dan wanita terlihat dalam tingkat kepatuhan pajak dan penyusunan strategi pembayaran beban pajak (Nehme & Jizi, 2018). Adanya keragaman pada jenis kelamin terhadap penghindaran pajak juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kehadiran dewan komisaris berjenis kelamin perempuan akan lebih berhati-hati terhadap potensi risiko reputasi apabila mereka melakukan strategi penghindaran pajak (Chen *et al.* 2017). Fallan (1999) juga mengaitkan adanya kehadiran perempuan dalam susunan dewan komisaris perusahaan akan meningkatkan nilai-nilai spiritual perusahaan sehingga akan mengurangi kegiatan penghindaran pajak yang ingin dicoba oleh perusahaan.

Hasil hipotesis kedua menjelaskan, Keragaman dewan komisaris selanjutnya yaitu pada keahlian keuangan yang dimiliki oleh dewan komisaris. Keahlian keuangan yang dimaksudkan yaitu ketika seorang dewan komisaris memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di ranah keuangan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* juga menjelaskan bahwa dalam hal susunan dewan komisaris terkhususnya dewan komisaris independen, seorang dewan komisaris harus memiliki latar belakang akuntansi ataupun manajemen, hal ini dikarenakan pengetahuan yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam hal melakukan pengawasan dan juga pemberian saran kepada pihak manajer. Dalam hal melakukan tindakan pengawasan dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan cenderung melakukan pengawasan yang lebih agresif, serta dapat meminimalkan masalah keagenan yang terjadi ketika level penghindaran pajak yang dimiliki oleh perusahaan berada dalam kategori yang ekstrem (Armstrong & A, 2015). Keahlian keuangan yang dimiliki oleh dewan komisaris memainkan peran penting sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal untuk mengatasi masalah agensi antara pemegang saham dan manajer (Zalata *et al.* 2018).

Hasil hipotesis ketiga menjelaskan, Keragaman dewan komisaris selanjutnya yaitu terkait dengan keragaman usia terhadap dewan komisaris. Keragaman usia terhadap dewan komisaris ini diartikan ketika susunan dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki dewan komisaris yang berusia lebih senior (Magnanelli & Pirolo, 2021). Hal ini dikarenakan semakin senior usia seseorang dalam hal ini adalah usia dewan komisaris akan mengambil dan membuat keputusan, khususnya dalam konteks praktik penghindaran pajak perusahaan. Usia yang lebih senior dan matang dinilai dapat melakukan pengawasan yang lebih baik sebagai langkah pencegahan untuk mencegah perusahaan dari praktik penghindaran pajak agar perusahaan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu usia dewan komisaris juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan, di mana usia dewasa yang

dimiliki oleh dewan komisaris berdampak positif terhadap kinerja perusahaan (Kagzi, 2018). Selanjutnya, karakter *risk adverse* yang dimiliki oleh seseorang yang usianya lebih senior dalam hal ini dewan komisaris, membuat dewan komisaris yang berusia lebih senior lebih enggan untuk melakukan hal yang berisiko salah satunya melakukan kegiatan penghindaran pajak. Tinggi rendahnya perusahaan dalam mengambil risiko ditentukan atau diindikasikan dari karakter dewan komisaris apakah termasuk seorang yang *risk taker* atau *risk adverse* (Paligorova, 2010).

Hasil hipotesis keempat menjelaskan, Keragaman dewan komisaris selanjutnya yaitu keragaman kewarganegaraan, yang dapat dilihat dari kehadiran dewan komisaris berkewarganegaraan asing dalam susunan dewan komisaris di perusahaan (Magnanelli & Pirolo, 2021). Adanya keragaman kewarganegaraan di antara anggota dewan komisaris dapat membawa banyak pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai pasar dan berbagai jenis pelanggan yang semakin relevan dengan lingkungan global saat ini (Magnanelli & Pirolo, 2021). Aspek keragaman tampaknya menjadi relevan terutama untuk perusahaan internasional karena latar belakang kewarganegaraan yang berbeda lebih baik mewakili setiap wilayah pasar di mana perusahaan beroperasi. Heterogenitas cara berpikir, gagasan, dan cara bertindak manajemen akan meningkatkan kinerja manajemen (Hambrick *et al.*, 1996). Selain itu hadirnya dewan komisaris asing juga dinilai memberikan tambahan keyakinan untuk investor internasional yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan yang diyakini telah dikelola secara profesional oleh mereka (Randoy, 2006).

Hasil hipotesis juga sesuai dengan konsep teori agensi yang menguraikan adanya perceraian di antara kepemilikan dan kontrol yang menyebabkan masalah agensi (Solomon, 2020). Untuk dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya masalah agensi ini dibutuhkan kombinasi *corporate governance* yang baik salah satunya melalui adanya pengawasan dari pihak dewan komisaris dan didukung dengan adanya heterogenitas dalam susunan dewan komisaris tersebut agar memberikan hasil pengawasan yang lebih kredibel nantinya (Magnanelli & Pirolo, 2021).

Additional analysis

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk memahami dampak atau efek dari variabel *financial expertise* yang diteliti. Seperti yang diketahui variabel tersebut dihitung dengan mengidentifikasi dewan komisaris yang mempunyai pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan. Pada analisis tambahan ini peneliti ingin mengeksplor lebih jauh lagi terkait dengan keanekaragaman pengalaman yang dimiliki oleh dewan komisaris. Peneliti mengklasifikasikan pengalaman kerja dewan komisaris menjadi 6 kelompok besar yaitu:

Table 4. Tabel *Experience Background* Dewan Komisaris

Kelompok	Pengalaman Kerja (<i>Experience Background</i>)
Kelompok 1	Keuangan: Dewan komisaris yang pernah bekerja dalam bidang akuntansi ataupun manajemen keuangan.
Kelompok 2	Kesehatan: Dewan komisaris yang pernah bekerja dalam bidang kesehatan seperti dokter, farmasi dan lain-lain.
Kelompok 3	Pegawai Negeri: Dewan komisaris yang pernah bekerja dalam bidang militer seperti purnawirawan jendral, polisi, pejabat pemerintahan dan lain-lain.
Kelompok 4	Profesional Non Kesehatan: Dewan komisaris yang pernah bekerja dalam bidang sosial seperti pengacara, psikologi dan lain-lain.
Kelompok 5	Teknik: Dewan komisaris yang pernah bekerja dalam Teknik seperti teknik kimia, energi, arsitek, dan lain-lain.
Kelompok 6	Lain: Dewan komisaris yang pernah bekerja pada bidang yang selain disebutkan di kelompok di atas.

Sumber: Data diolah

Sehingga permodelan regresi yang akan digunakan untuk menguji variabel tambahan ini yaitu:

$$[(TA)]_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 [(Female)]_{it} + \alpha_2 CKeuangan + \alpha_3 CKesehatan + \alpha_4 CPN + \alpha_5 CProfNonKes + \alpha_6 CTeknik + \alpha_7 CLain + \alpha_8 [(AGE)]_{it} + \alpha_9 [(Nationality)]_{it} + \alpha_{10} [(SIZE)]_{it} + \alpha_{11} [(LEV)]_{it} + \alpha_{12} [(ROE)]_{it} + \alpha_{13} [(Growth)]_{it} + \varepsilon_{it}$$

Hasil uji parsial untuk variabel independen tambahan menjelaskan bahwa hanya variabel latar belakang pengalaman keuangan yang memiliki nilai signifikan di bawah 5% dan berkorelasi negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independen tambahan lainnya memiliki nilai signifikansi di atas 5% yang menjelaskan bahwa variabel tersebut tidak memiliki signifikansi yang cukup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengalaman non-keuangan dari dewan komisaris tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ketika diukur dengan model ETR dan LTD. Konsep ini sesuai dengan prinsip teori agensi yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan memerlukan praktik tata kelola yang baik, dan salah satu aspeknya adalah melalui adanya pengawasan dari dewan komisaris untuk dapat mencegah terjadinya masalah agensi ini serta dapat mengawasi perusahaan agar perusahaan tidak melakukan kegiatan penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976).

Variabel Independen	B	t-test Sig.	F-test Sig.	Adjusted R ²
(Constant)	-0,132	0,010	0,000	0,179
Female	-0,053	0,000		
CKeuangan	-0,035	0,000		
CKesehatan	-0,016	0,208		
CPN	0,000	0,967		
CProfNonKes	-0,003	0,685		
CTeknik	-0,011	0,169		
CLain	-0,008	0,538		
AGE	-0,002	0,000		
Nationality	-0,094	0,000		
SIZE	0,004	0,018		
LEV	-0,093	0,000		
ROE	0,002	0,937		
Growth	-0,001	0,782		

Gambar 5. Hasil Pengujian Regresi Linier Model 1: ETR

Sumber: Data diolah

Variabel Independen	B	t-test Sig.	F-test Sig.	Adjusted R ²
(Constant)	-0,692	0,026	0,000	0,112
Female	-0,366	0,000		
CKeuangan	-0,081	0,040		
CKesehatan	-0,018	0,807		
CPN	-0,034	0,553		
CProfNonKes	-0,033	0,434		
CTeknik	0,029	0,532		
CLain	0,061	0,417		
AGE	-0,006	0,015		
Nationality	-0,337	0,001		
SIZE	0,060	0,000		
LEV	-0,415	0,000		
ROE	-0,224	0,130		
Growth	-0,115	0,046		

Gambar 6. Hasil Pengujian Regresi Linier Model 2: LTD

Sumber: Data diolah

Penelitian ini juga memperkuat hasil hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menguji terkait dengan *financial expertise* yang dimiliki oleh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Adanya latar belakang pengalaman dalam bidang keuangan pada dewan komisaris dapat membantu mereka dalam melakukan pengawasan yang lebih agresif seperti pengawasan pada laporan keuangan perusahaan kemudian mengawasi serta mencegah ketika perusahaan berniat merencanakan dan melakukan kegiatan penghindaran pajak berbekal dari pengalaman yang telah mereka dapatkan sebelumnya (Armstrong & A, 2015).

Berdasarkan definisi ilmu pengetahuan dapat dijelaskan bahwa latar belakang non keuangan memiliki *scope* yang berbeda dengan *scope* dari kelompok keuangan, dan tentu saja dewan komisaris dengan latar belakang pengalaman non keuangan tersebut tidak akan mengetahui kegiatan-kegiatan keuangan ataupun perpajakan seperti ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan pengalaman yang berbeda dewan komisaris akan sulit untuk mendeteksinya, berbeda ketika dewan komisaris tersebut sebelumnya telah memiliki pengalaman yang selinear dengan permasalahan keuangan dan perpajakan (Armstrong & A, 2015).

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, perlu dicatat bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan. Pertama perhitungan penghindaran pajak yang hanya diukur oleh 2 proksi saja yaitu ETR dan BTD. Kedua penelitian ini hanya menggunakan satu variabel sebagai indikator dari *corporate governance* yaitu keragaman dewan komisaris. Meskipun peneliti telah menambahkan beberapa variabel kontrol, peneliti mungkin tidak berhasil mengidentifikasi semua variabel potensial yang dihilangkan yang berkorelasi. Terlepas dari keterbatasan yang telah dijelaskan, temuan peneliti dapat dibuktikan berharga bagi investor, manajer, dan regulator karena memiliki implikasi bagi semua pihak terkait ini.

REFERENSI

- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94, 291-309.
- Armstrong, C., J. B., & A, J. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics* 60, 1-17.
- Aslam, E., & Haron, R. (2021). "Corporate governance and banking performance: the mediating role of intellectual capital among OIC countries. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 21 No. 1, 111-136, doi: 10.1108/CG-08-2020-0312.
- BAPPENAS. (2023, Agustus). *Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045*. Retrieved from Indonesia Emas 2045: <https://indonesia2045.go.id/aspirasi>
- Barros, V., & Sarmiento, J. (2020). "Board meeting attendance and corporate tax avoidance: evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, Vol. 8 No. 1, 51-66.
- Bayar, O., Huseynov, F., & Sardarli, S. (2018). Corporate governance, tax avoidance, and financial constraints. *Financial Management*, Vol. 47 No. 3, 651-677.
- Chen, J., Leung, W., & Goergen, M. (2017). The impact of board gender composition on dividend payouts. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 43, 86-105.
- Dihni, V. A. (2022, Agustus 5). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>

- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2 (1).
- Fallan, L. (1999). Gender, exposure to tax knowledge, and attitudes towards taxation: an experimental approach. *Journal of Business Ethics*, Vol. 18 No. 2, 173-184.
- Fama, E. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *Journal of Political Economy*, Vol. 88 No. 2, 288-307.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Fitriyawati, D. S. (2019). Pengaruh karakteristik eksekutif dan dewan komisaris terhadap agresivitas pajak. 1-24.
- Govindan, K., Kilic, M., Uyar, A., & Karaman, A. (2021). Drivers and value-relevance of CSR performance in the logistics sector: a cross-country firm-level investigation. *International Journal of Production Economics*, Vol. 231, 107835, doi: 10.1016/j.ijpe.2020.107835.
- Gujarati, D. N. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hambrick, D. C., Cho, T. S., & Chen, M. J. (1996). The influence of top management team heterogeneity on firms' competitive moves. *Administrative Science Quarterly*, 41(4), 59-684.
- Hantoyo, S. S., Kertahadi, & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 9 No. 1*, 1-7.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, Vol. 46 No. 2, 199-212.
- Huang, H., & Zhang, W. (2019). Financial expertise and corporate tax avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics* doi: 10.1080/16081625.2019.1566008.
- Jarboui, A., Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, Vol. 27 No. 4, 1389-1408, doi: 10.1108/JFC-09-2019-0122.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economic* Vol. 3 No. 4, 305-360.
- Jhunjhunwala, S., & Mishra, R. K. (2012). Board diversity and corporate performance: The Indian evidence. *The IUP Journal of Corporate Governance*, 11(3), 71-79.
- Kagzi, G. (2018). Does board demographic diversity influence firm performance? Evidence from indian-knowledge intensive firms. *Indian Institute of Management Rohtak International Journal* Vol. 25, No. 3, 1028-1058.
- Kahar. (2016). *Pengaruh Age Diversity, Gender Diversity dan Occupational Heterogeneity Terhadap Financial Performance Bank Umum di Indonesia*. Jakarta: STIE Indonesia Banking School.
- Kurniati, D. (2023, Januari 3). *Realisasi Pajak Sepanjang 2022 Tembus 115,6% dari Target*. Retrieved from DDTC: <https://news.ddtc.co.id/realisasi-pajak-sepanjang-2022-tembus-1156-dari-target-44698>

- Magnanelli, B. S., & Pirolo, L. (2021). *Corporate Governance and Diversity in Boardrooms: Empirical Insights into the Impact on Firm Performance*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Mala, M. D. (2021). Pengaruh diversitas gender dewan direksi dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 10, Nomor 1*, 1-11.
- Nadeem, M., Zaman, R., & Saleem, I. (2017). Boardroom gender diversity and corporate sustainability practices: evidence from Australian securities exchange listed firms. *Journal of Cleaner Production, Vol. 149*, 874-885.
- Nasution, D., & Jonnergard, K. (2016). Do auditor and CFO gender matter to earnings quality? Evidence from Sweden. *Gender in Management : An International Journal, 32 (5)*, 330-351.
- Nehme, R., & Jizi, M. (2018). The efficiency of corporate boards and firms' audit fees: the case of the FTSE financial institutions. *Pacific Accounting Review, Vol. 30 No. 3*, 297-317.
- Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure*. Canada: Bank of Canada Working Paper.
- Randoy, T. (2006). A Nordic Perspective on Corporate Board Diversity. *Nordic Innovation Center project number: 05030*.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy, 26*, 689-704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>.
- Richardson, G., & Lanis, T. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia: an empirical analysis. *Accounting Research Journal, Vol. 29 No. 3*, <http://dx.doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>, 313-331.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2021). The impact of audit characteristics on corporate tax avoidance: the moderating role of gender diversity. *Scientific Annals of Economics and Business, Vol. 68 No. 1*, 97-114.
- Saleem, I., Khan, M., Hasan, R., & Ashfaq, M. (2021). Corporate board for innovative managerial control: implications of corporate governance deviance perspective", *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society Vol. 21 No. 3*, 450-462, doi: 10.1108/CG-04-2020-0151.
- Shilvina, W. (2022, Juli 22). *Benarkah Rasio Pajak Indonesia Terendah di Asia Tenggara?* Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/benarkah-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-asia-tenggara>
- Solomon, J. (2020). *Corporate Governance and Accountability Fifth Edition*. United Kingdom: Wiley.
- Srinidhi, B., Gul, F. A., & Tsui, J. (2011). Female directors and earnings quality. *Contemporary Accounting Research, 28(5)*, 1610-1644.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. (2021). Corporate ownership, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. *Profita: : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12(3)*, 361-377.
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan dewan direksi, keberagaman gender dan kinerja berkelanjutan terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 4 No 5*, 1648-1666.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

- World Bank Data. (2023). *Tax revenue (% of GDP) - Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Philippines, Lao PDR*. Retrieved from The World Bank Data: https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?contextual=default&end=2021&locations=ID-MY-SG-TH-BN-VN-MM-KH-PH-LA&most_recent_value_desc=true&start=2021&view=bar
- Wulandari, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Peran kompetensi dewan komisaris dalam penghindaran pajak dan manajemen laba. *Jurnal Penelitian Akuntansi Vol. 2, No.1*, 17-29.
- Zalata, A., Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does the gender of the financial expert matter? *International Review of Financial Analysis, Vol. 55*, 170-183, doi: 10.1016/j.irfa.2017.11.002.